



Peran Cenderawasih Pos Sebagai Civic Media: Agen Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangkal Disinformasi di Papua

Ricky Engel Mawara

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
Email: ricky.mawara@yahoo.co.id

Fikstif Donal Lintong

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
Email: fikstifdonallintong@gmail.com

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2026-05-08	Accepted	: 2026-06-02
Revised	: 2026-06-01	Published	: 2026-06-18

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10747>

Abstrak

Disinformasi di wilayah rentan konflik seperti Papua memiliki implikasi sosial yang fatal, sebagaimana dibuktikan oleh eskalasi kerusuhan Wamena 2023 akibat penyebaran hoaks. Penelitian ini mengkaji peran strategis Cenderawasih Pos sebagai civic media dalam menangkal disinformasi sekaligus bertindak sebagai agen pendidikan kewarganegaraan (PKn). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan yang terdiri atas redaktur, jurnalis verifikasi, dan tim media sosial Cenderawasih Pos, serta didukung oleh analisis dokumen editorial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cenderawasih Pos menjalankan peran civic media melalui tiga mekanisme: (1) membangun civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions warga melalui konten diskusi analitis; (2) menerapkan arsitektur editorial anti-disinformasi berlapis; dan (3) mengoptimalkan jangkauan geografis di wilayah terpencil yang tidak terjangkau oleh media nasional. Kendati demikian, efektivitas peran tersebut masih terhambat oleh laju penyebaran hoaks yang asimetris dibandingkan proses verifikasi, keterbatasan sumber daya redaksional, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi civic media lokal di Papua menuntut intervensi ekosistemik, bukan sekadar penguatan institusional internal media.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Disinformasi, Cenderawasih Pos

Abstract

Disinformation in conflict-prone regions such as Papua carries fatal social implications, as evidenced by the escalation of the 2023 Wamena riots triggered by the spread of hoaxes. This study examines the strategic role of Cenderawasih Pos as a civic medium in countering disinformation while serving as an agent of civic education. A descriptive qualitative approach was employed through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews with eight informants consisting of editors, verification journalists, and the social media team of Cenderawasih Pos, supplemented by an analysis of editorial documents. The findings reveal that Cenderawasih Pos performs its civic media role through three mechanisms: (1) developing citizens' civic knowledge, civic skills, and civic dispositions through analytical discussion-based content; (2) implementing a multilayered anti-disinformation editorial architecture; and (3) optimising geographical reach to remote areas inaccessible to national media. Nevertheless, the effectiveness of this role remains constrained by the asymmetric pace of hoax dissemination compared to verification processes, limited editorial resources, and low public digital literacy. These findings underscore that the optimisation of local civic media in Papua demands ecosystemic intervention rather than mere internal institutional reinforcement.

Keyword: Civic Education, Disinformation, Cenderawasih Pos

PENDAHULUAN

Sebaran disinformasi di Indonesia telah mencapai skala yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir dan menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah yang paling rentan



terhadap dampak destruktif. Masalah ini terus meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi (Putri et al., 2025). Dengan adanya temuan 12.547 kasus hoaks selama periode Agustus 2018 hingga Desember 2023. Situasi ini tidak mengalami perbaikan signifikan. Pada tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.923 konten disinformasi, dengan kategori politik (237 konten) dan pemerintahan (214 konten) yang paling dominan. Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) mencatat 2.330 temuan hoaks pada tahun 2023, 55,5% (sekitar 1.292 konten) diantaranya bermuatan politik, dua kali lipat lebih tinggi dibanding Pemilu 2019 (MAFINDO, 2024). Dua kategori tersebut merupakan kategori yang secara langsung relevan dengan dinamika informasi di Papua.

Data tersebut semakin serius ketika dikontekstualisasikan dengan kondisi Papua. Sepanjang tahun 2021, ditemukan maraknya penyebaran isu Papua di ruang siber dengan puncaknya menjelang tanggal 1 Desember. Narasi disinformasi yang beredar tidak hanya berupa informasi keliru, melainkan pembingkaihan terorganisir (*information framing*) yang secara sistematis mendiskreditkan pemerintah dan memanipulasi persepsi publik mengenai situasi keamanan di Papua (Sutomo et al., 2022; Widyaningsih & Lestari, 2020). Dampak nyata disinformasi di Papua terekam pada peristiwa Wamena, Papua Pegunungan, Februari 2023 (Sumule et al., 2024). Kerusuhan di Wamena yang dipicu beredarnya hoaks penculikan anak menewaskan 12 warga, melukai 23 warga dan 18 aparat keamanan, serta membakar 13 rumah dan dua kios.

Mudahnya masyarakat terhasut kabar bohong didasari literasi yang belum merata, sehingga masih banyak warga tidak mampu membedakan hoaks dan informasi yang benar (Fatimah Az-zahra et al., 2025). Situasi tersebut diperparah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal (R. Mawara & Rusli, 2025; Suriadi, 2025). Fakta-fakta ini menempatkan fenomena disinformasi di Papua bukan sekadar masalah informasi, melainkan ancaman serius yang dapat menghambat stabilitas demokrasi dan keselamatan jiwa warga (R. E. Mawara, 2025).

Kondisi geografis dan demografis Papua yang unik menempatkan media lokal pada posisi strategis. Dengan luas mencakup 400.000 km², 250 kelompok etnis, dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di wilayah pegunungan, media nasional yang beroperasi dari Jakarta tidak mampu menjangkau dan memahami secara kontekstual kebutuhan informasi masyarakat lokal. Dalam kondisi ini, media lokal menjadi garis pertahanan terdepan dalam penyebaran informasi terverifikasi. Kedekatan geografis dengan sumber peristiwa, jaringan korespondensi yang menjangkau distrik dan kampung, serta pemahaman konteks sosial-budaya lokal memberikan media lokal kapasitas verifikasi yang secara struktural lebih responsif dibanding media nasional.

Mandat hukum atas peran media dalam demokrasi telah digariskan jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa pers berfungsi sebagai media pendidikan; Pasal 6 huruf (b) mengamanatkan pers untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia; sedangkan Pasal 6 huruf (c) mewajibkan pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Pasal 6 huruf (c) ini secara esensial adalah mandat anti-disinformasi yang tertanam dalam arsitektur hukum nasional sejak 1999 - sebuah mandat yang dalam konteks Papua memperoleh urgensi tambahan mengingat tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi yang unik. Media lokal, khususnya Cenderawasih Pos, mengemban tanggung jawab konstitusional ini dalam kondisi keterbatasan infrastruktur yang justru menjadi peluang untuk mengembangkan kapasitas civic media yang relevan secara kontekstual.

Meskipun mandat hukum pers sebagai agen pendidikan kewarganegaraan telah digariskan dengan jelas sejak 1999, kajian akademik yang secara serius menganalisis sejauh mana media lokal menjalankan mandat tersebut dalam konteks anti-disinformasi melalui lensa Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat terbatas. Penelitian yang ada cenderung menempatkan media sebagai objek analisis konten atau aktor dalam ekosistem informasi, tanpa menganalisisnya sebagai institusi pembentuk civic literacy warga. Penelitian yang menghubungkan media lokal Papua, Pendidikan Kewarganegaraan, dan anti-disinformasi secara sintesis dalam satu kerangka analisis yang utuh belum pernah dilakukan inilah celah epistemik yang ingin diisi penelitian ini.

Pemetaan literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang disinformasi di Indonesia berkonsentrasi pada tiga kluster, yaitu pola penyebaran hoaks di media sosial, dampak terhadap stabilitas sosial-politik, serta program literasi digital. Penelitian tentang Papua lebih fokus pada dinamika konflik dan kebijakan otonomi, dengan kajian tentang peran media lokal yang masih bersifat deskriptif. Penelitian yang menganalisis secara sintesis bagaimana media lokal Papua menjalankan peran *civic* media sambil berkontribusi pada pembentukan civic literacy masyarakat dalam konteks pencegahan disinformasi belum ada. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memosisikan Cenderawasih Pos, surat kabar tertua di Papua, sebagai subjek studi yang dianalisis melalui kerangka ganda *civic* media dan *civic literacy*.

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana Cenderawasih Pos menjalankan peran civic media dalam menangkal disinformasi di Papua? (2) Bagaimana peran tersebut berkontribusi pada pembentukan civic literacy masyarakat? (3) Strategi editorial apa yang digunakan Cenderawasih Pos sesuai dengan mandat pendidikan pers dalam UU No. 40/1999?

Konsep disinformation dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang disebarakan dengan niat menyesatkan (Wardle & Derakhshan, 2017). Fakta bahwa disinformasi di Papua secara konsisten muncul dalam bentuk narasi terorganisir dengan target sosial-politik tertentu memperkuat relevansi konsep Wardle dan Derakhshan, karena yang dihadapi bukan kegagalan komunikasi, melainkan manipulasi yang terencana. Dalam pengertian (Habermas, 1989), disinformasi merusak *Öffentlichkeit* (ruang publik demokratis) di mana warga seharusnya mendiskusikan kepentingan bersama secara rasional-kritis.

Civic media merupakan praktik produksi serta distribusi konten dengan tujuan penguatan kapasitas warga untuk berpartisipasi pada kehidupan demokratis (Gordon & Mihailidis, 2016). Konsep ini melengkapi gagasan tentang *monitorial citizen* atau warga yang mampu memantau lingkungan informasinya secara kritis (Schudson, 1998). Civic literacy yang dikembangkan NCSS (2013) mencakup tiga dimensi: *civic knowledge* (pengetahuan sistem pemerintahan), *civic skills* (kemampuan evaluasi informasi), dan *civic dispositions* (komitmen pada nilai-nilai demokratis). Ketiga dimensi ini mempunyai fondasi hukum yang kuat dalam UU Pers yang mengamanatkan media sebagai agen pendidikan kewarganegaraan sejak 1999.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipilih sebagai respons epistemik terhadap karakter pertanyaan penelitian. Memahami bagaimana sebuah institusi media menjalankan peran *civic*-nya menuntut penelusuran logika, keputusan, dan strategi yang melatarinya merupakan suatu hal yang tidak dapat dijawab melalui prosedur statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik subjek penelitian dalam konteks alaminya, serta memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses pemahaman fenomena (Denzin & Lincoln, 1994; Sugiyono, 2011).

Penelitian dilaksanakan di kantor redaksi Cenderawasih Pos, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sepanjang Agustus hingga Desember 2025. Cenderawasih Pos dipilih karena posisinya sebagai surat kabar harian tertua, paling mapan, dan dengan jangkauan distribusi paling luas di Papua, sehingga representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kapasitas dan relevansi mereka terhadap fokus kajian (Moleong, 2017; Sugiyono, 2011). Total delapan informan terlibat dalam penelitian ini, dengan rincian: lima Redaktur (kode AH, WF, LI, AN, dan E) yang merepresentasikan level kebijakan editorial; satu Editor (kode GS) yang berperan dalam pengambilan keputusan publikasi; satu Jurnalis Verifikasi (kode P) yang menangani liputan cek fakta sebagai pelaksana operasional; serta satu anggota Tim Media Sosial (kode AE) yang bertanggung jawab atas distribusi konten di kanal digital. Komposisi

informan ini dirancang untuk mencakup tiga level operasional redaksi, yaitu kebijakan editorial, praktik verifikasi lapangan, dan diseminasi konten digital, sehingga memungkinkan pemetaan menyeluruh atas peran Cenderawasih Pos sebagai civic media.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode yang saling melengkapi, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi respons informan secara reflektif tanpa kehilangan fokus pada pertanyaan penelitian (Creswell, 2014). Panduan wawancara disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kebijakan editorial dalam merespons disinformasi, mekanisme verifikasi fakta, dan persepsi informan tentang peran Cenderawasih Pos sebagai agen pendidikan kewarganegaraan. Analisis dokumen mencakup penelusuran produk jurnalistik Cenderawasih Pos berupa artikel berita, rubrik cek fakta, dan pemberitaan terkait isu-isu berpotensi disinformasi yang terbit selama periode penelitian. Kombinasi kedua metode ini sekaligus berfungsi sebagai mekanisme triangulasi metode yang memperkuat validitas temuan.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga komponen siklikal: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi simpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi, data wawancara dan dokumen editorial dipilah, difokuskan, dan disederhanakan melalui pengkodean tematik yang mengacu pada kerangka teoritis penelitian. Pada tahap penyajian, data diorganisasikan sedemikian rupa sehingga hubungan antartema menjadi kasat mata dan dapat diperdebatkan secara analitis. Simpulan kemudian dibangun secara induktif: setiap klaim interpretif diuji kembali ke korpus data mentah, dan hanya ditetapkan ketika konsistensinya terkonfirmasi lintas sumber dan lintas metode.

Keabsahan data dijamin menggunakan empat mekanisme dan diterapkan secara konsisten sepanjang proses penelitian. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari delapan informan yang merepresentasikan tiga level operasional redaksi, sehingga temuan tidak bergantung pada satu perspektif tunggal. Kedua, triangulasi metode dilakukan dengan menyandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen editorial untuk memverifikasi konsistensi antara apa yang dinyatakan informan dengan apa yang tercermin dalam praktik jurnalistik (Lincoln & Guba, 1985). Ketiga, member check dijalankan bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai mekanisme koreksi nyata: interpretasi yang telah disusun dikembalikan ke informan, dan jika ada yang tidak diakui sebagai representasi akurat dari apa yang mereka maksud, interpretasi itu direvisi. Keempat, setiap keputusan analitis dalam penelitian ini meninggalkan jejak yang terdokumentasi sehingga proses ini tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga dapat diverifikasi (Lincoln & Guba, 1985).

Etika penelitian dijaga melalui dua prinsip utama, yaitu kesukarelaan dan perlindungan identitas. Tidak ada informan yang diwawancarai tanpa terlebih dahulu memahami konteks dan tujuan penelitian ini. Nama mereka tidak dicantumkan, posisi dan kode inisiallah yang menjadi penanda, cukup untuk keperluan analitis tanpa membuka identitas yang sesungguhnya. Persetujuan publikasi data, termasuk penggunaan kutipan langsung dalam laporan penelitian, diperoleh secara eksplisit dari masing-masing informan sebelum naskah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran Cenderawasih Pos sebagai civic media dalam menangkal disinformasi sekaligus sebagai agen pendidikan kewarganegaraan di Papua. Hasil wawancara mendalam dengan delapan informan yang merepresentasikan tiga level operasional redaksi disajikan dalam empat sub-bab yang saling terkait. Profil lengkap informan disajikan pada Tabel.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode	Jabatan	Level Operasional	Waktu Wawancara
AH	Redaktur	Kebijakan editorial	September 2025
WF	Redaktur	Kebijakan editorial	September 2025
LI	Redaktur	Kebijakan editorial	Oktober 2025
AN	Redaktur	Kebijakan editorial	Desember 2025
E	Redaktur	Kebijakan editorial	September 2025
GS	Editor	Pengambilan keputusan	September 2025
P	Jurnalis Verifikasi	Praktik operasional	September 2025
AE	Tim Media Sosial	Diseminasi digital	September 2025

Konstruksi Redaksional atas Disinformasi sebagai Ancaman Ruang Publik

Pemahaman institusi media atas karakter disinformasi menentukan kualitas respons editorial yang dihasilkannya. Wawancara dengan delapan informan Cenderawasih Pos menunjukkan bahwa konstruksi redaksional atas hoaks bersifat berlapis dan secara konsisten menempatkan niat (*intentionality*) sebagai elemen pembeda utama. Redaktur LI menjelaskan kategori ini secara lugas:

“Hoaks itu bukan sekadar salah informasi. Ada yang bikin, ada yang tahu itu salah, tapi tetap disebar karena ada tujuannya. Bisa politik, bisa ekonomi, bisa juga merusak nama orang. Itu yang berbahaya, karena itu terencana.” (Informan LI, Redaktur, wawancara Oktober 2025)

Pernyataan LI sejalan dengan konsep *disinformation* Wardle dan Derakhshan (2017) yang membedakan disinformasi dari *misinformation* pada elemen niat menyesatkan. Apa yang disebut LI sebagai "terencana" mencerminkan presisi terminologis yang menunjukkan kesadaran analitis redaksi terhadap karakter ancaman informasi.

Dimensi sumber dan sirkulasi muncul dari pernyataan Redaktur AN yang menyoroti kategori paling sulit ditangani secara operasional:

“Yang paling susah itu hoaks yang sumbernya tidak jelas tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Orang sudah percaya, sudah viral, padahal belum ada yang bisa membuktikan itu benar atau tidak. Di Papua ini bisa sangat berbahaya karena masyarakat mudah terpancing.” (Informan AN, Redaktur, wawancara Desember 2025)

Situasi yang dikemukakan AN dapat dikategorikan sebagai informasi abu-abu, yaitu konten yang belum tervalidasi namun telah mengalami penyebaran masif dan diterima sebagai fakta oleh sebagian komunitas. Fenomena ini diperparah oleh mekanisme circular reporting, ketika klaim saling mengutip tanpa verifikasi mandiri sehingga menciptakan ilusi konsensus yang semu.

Konteks Papua yang spesifik mendorong munculnya dimensi emosional sebagai penguat sirkulasi disinformasi. Redaktur WF mengidentifikasi pola ini:

“Hoaks yang paling cepat menyebar di sini itu yang menyentuh perasaan orang karena mencakup suku, agama, dan martabat. Begitu orang sudah merasa tersinggung, mereka tidak berpikir lagi apakah ini benar atau tidak. Langsung bagikan.” (Informan WF, Redaktur, wawancara September 2025)

Pernyataan WF akhirnya menjelaskan terkait pendekatan verifikasi yang tidak mencukupi untuk memutus rantai disinformasi di Papua. Ketika hoaks bekerja lewat resonansi emosional, klarifikasi faktual kerap kalah oleh momentum afektif yang mendahuluinya (Wardle & Derakhshan, 2017). Disinformasi tidak hanya merusak akurasi informasi, tetapi juga mengganggu prasyarat ruang publik (*Öffentlichkeit*) sebagai arena diskursus rasional-kritis (Habermas, 1989). Konstruksi redaksional berlapis yang mencakup dimensi niat, kejelasan sumber, dan muatan emosional inilah yang membentuk fondasi epistemik respons editorial Cenderawasih Pos.

Cenderawasih Pos sebagai Agen Civic Literacy

Data wawancara menunjukkan bahwa Cenderawasih Pos menjalankan peran agen civic literacy melalui dua jalur, yaitu penyediaan konten yang membangun tiga domain *civic literacy* menurut NCSS (2013), serta inisiatif kampanye yang memperluas edukasi kewargaan melampaui batas format berita konvensional. Pada domain *civic knowledge*, Cenderawasih Pos secara konsisten menyediakan konten yang menguraikan hak konstitusional warga. Redaktur AH menjelaskan logika editorialnya:

“Kami sadar bahwa banyak warga di Papua, terutama yang jauh dari kota, tidak tahu apa yang menjadi hak mereka dan apa kewajiban mereka sebagai warga negara. Kalau mereka tidak tahu hak mereka, mereka mudah dibohongi. Maka kami sengaja hadirkan informasi itu secara rutin, dalam bahasa yang mudah dipahami.” (Informan AH, Redaktur, wawancara September 2025)

Pernyataan AH menegaskan argumen bahwa ketidaktahuan atas hak konstitusional adalah prasyarat kerentanan terhadap disinformasi. Penyediaan civic knowledge yang sistematis membangun dasar pemahaman warga untuk mengevaluasi klaim yang beredar di ruang publik.

Pada domain *civic skills*, strategi editorial Cenderawasih Pos secara langsung melatih pembaca melakukan verifikasi. Editor GS menggambarkan pendekatannya:

"Kami tidak cukup hanya memberitakan hoaks yang sudah terjadi. Yang lebih penting adalah mengajarkan masyarakat bagaimana caranya mengenali hoaks sejak awal. Cek sumbernya, lihat tanggalnya, cari di media yang terpercaya. Ini yang kami coba tanamkan lewat konten-konten kami." (Informan GS, Editor, wawancara September 2025)"

Pendekatan GS bersesuaian dengan konsep *monitorial citizen* (Schudson, 1998), yaitu warga yang memiliki kapasitas memantau lingkungannya secara kritis. Cenderawasih Pos memfasilitasi pembentukan kapasitas monitoring ini melalui konten pedagogis yang tidak hanya menyajikan kebenaran, melainkan juga mengajarkan cara menemukan kebenaran.

Pada domain civic dispositions, jalur konten yang lebih halus namun signifikan terbentuk melalui pemberitaan kegiatan sosial. Jurnalis P menjelaskan fungsinya:

"Ketika kami meliput gotong royong di kampung, kerja bakti, atau kegiatan sosial masyarakat, sebenarnya kami sedang menunjukkan bahwa warga bisa berbuat sesuatu untuk lingkungannya. Itu membangun kepedulian, rasa memiliki. Dan orang yang punya rasa kepemilikan seperti itu tidak mudah terhasut hoaks yang ingin memecah belah." (Informan P, Jurnalis, wawancara September 2025)

Perspektif P menunjukkan pemahaman atas fungsi *civic dispositions*, bahwa ikatan sosial dan rasa kepemilikan kolektif merupakan benteng struktural terhadap disinformasi yang lebih tahan lama dibanding koreksi faktual yang bersifat insidental.

Di luar arus pemberitaan reguler, Cenderawasih Pos menjalankan kampanye kewarganegaraan yang lebih terstruktur melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah, dalam bentuk kelas literasi media, lokakarya hak-kewajiban warga, dan seminar partisipasi pemilu. Anggota Tim Media Sosial AE menjelaskan strategi diseminasinya:

"Di media sosial kami kemas ulang materi yang ada di koran. Infografik, carousel, video pendek, disesuaikan dengan cara orang muda mengonsumsi informasi. Tujuannya sama, yaitu mendidik, tapi kemasannya harus berbeda agar bisa menjangkau lebih banyak orang." (Informan AE, Tim Media Sosial, wawancara September 2025)

Strategi adaptasi format lintas platform mencerminkan praktik *civic media*, yaitu produksi dan distribusi konten yang berorientasi pada penguatan kapasitas partisipasi warga, bukan sekadar konsumsi informasi (Gordon & Mihailidis, 2016). Pola ini menempatkan Cenderawasih Pos sebagai institusi yang menjalankan mandat Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/1999 tentang fungsi pers sebagai media pendidikan.

Arsitektur Editorial Anti-Disinformasi: Strategi *Gatekeeping* dan Literasi Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi Cenderawasih Pos dalam menangkal disinformasi bekerja pada dua lapisan yang saling mendukung: kontrol mutu internal sebelum dan sesudah publikasi, serta edukasi publik yang memperpanjang fungsi verifikasi ke level individu pembaca.

Pada lapisan pertama, mekanisme *gatekeeping* berlapis menjadi ciri menonjol arsitektur editorial Cenderawasih Pos. Redaktur AH mendeskripsikan prosesnya:

“Setiap berita yang masuk harus melewati verifikasi. Cek data, konfirmasi ke sumber primer, pastikan konsistensi antara judul, isi, dan fakta pendukung. Tidak ada yang lolos begitu saja. Kalau ada yang ragu, tahan dulu sampai benar-benar yakin. Di media cetak lebih ketat lagi karena begitu sudah cetak, tidak bisa diubah.” (Informan AH, Redaktur, wawancara September 2025)

Redaktur E menambahkan dimensi normatif yang mendasari disiplin verifikasi ini:

“Kode etik jurnalistik itu bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi secara formal. Itu adalah kompas. Setiap keputusan editorial, terlepas siapa narasumbernya, dibingkai bagaimana, serta akan diterbitkan atau tidak, semua itu kembali ke sana. Dan kode etik itu yang paling efektif mencegah kita menjadi bagian dari masalah disinformasi.” (Informan E, Redaktur, wawancara September 2025)

Pernyataan E menunjukkan bahwa ketaatan pada kode etik jurnalistik berfungsi sebagai sistem anti-disinformasi yang fundamental. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 6 huruf (c) UU No. 40/1999 yang mewajibkan pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Ketika disinformasi telah terlanjur beredar, mekanisme koreksi transparan menjadi instrumen penting. Redaktur LI menjelaskan prinsipnya:

“Koreksi itu bukan kelemahan, itu justru bukti integritas. Kalau ada yang salah, kami perbaiki secara terbuka, baik di koran, di media sosial, di mana pun berita itu menyebar. Kami tambahkan catatan koreksi, jelaskan apa yang berubah dan mengapa. Transparansi itu yang membangun kepercayaan.” (Informan LI, Redaktur, wawancara Oktober 2025)”

Pernyataan LI mengandung teori kepercayaan publik yang substantif, yakni bahwa akuntabilitas terbuka lebih efektif membangun kredibilitas institusi media dibanding sekadar ketiadaan kesalahan.

Pada lapisan kedua, strategi editorial diperpanjang ke edukasi publik yang memperkuat kapasitas verifikasi di tingkat individu. Redaktur WF menjelaskan pendekatannya:

“Kami tidak bisa sendirian melawan hoaks. Redaksi sudah sekeras mungkin memfilter, tapi kalau masyarakat tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoaks, perang ini tidak akan pernah menang. Makanya kami juga mengedukasi masyarakat melalui konten dan infografik tentang bagaimana caranya memverifikasi informasi sebelum dibagikan.” (Informan WF, Redaktur, wawancara September 2025)

Perspektif WF menunjukkan bahwa efektivitas civic media tidak serta-merta diukur dari kualitas produk jurnalistik, tetapi juga dari sejauh mana dapat mengembangkan kapasitas literasi publik. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari konsep *monitorial citizen* (Schudson, 1998), di mana media lokal berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang memfasilitasi fungsi monitoring informasi oleh warga.

Komponen hak jawab memperkuat dimensi akuntabilitas ini. Redaktur AN menjelaskan implementasinya:

“Hak jawab itu bukan hanya soal memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan. Itu juga cara kami menghindari agar informasi keliru tidak berkembang lebih jauh. Kalau ada yang merasa diberitakan tidak benar, kami buka ruang untuk itu, kami periksa ulang semua faktanya, dan kami terbitkan koreksinya.” (Informan AN, Redaktur, wawancara Desember 2025)

Mekanisme hak jawab yang dideskripsikan AN menempatkan Cenderawasih Pos sebagai civic actor yang melampaui fungsi produksi berita, sekaligus sebagai mediator dalam sengketa informasi publik. Peran ini relevan dengan mandat Pasal 6 huruf (b) UU No. 40/1999 tentang penegakan nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam praktik jurnalisme.

Batas-Batas Kelembagaan: Tantangan Struktural dan Implikasi bagi Penguatan Civic Media

Tantangan paling fundamental adalah disparitas laju antara kecepatan penyebaran disinformasi dan kapasitas respons redaksional. Jurnalis P mendeskripsikan realitas operasional ini:

“Hoaks itu menyebar dalam hitungan menit, sudah dibagikan ribuan kali sebelum kami sempat memverifikasi dan menerbitkan klarifikasi. Begitu koreksi kami keluar, yang sudah terlanjur percaya hoaks itu sudah jauh lebih banyak dari yang membaca koreksi kami. Ini yang paling melelahkan.” (Informan P, Jurnalis, wawancara September 2025)

Deskripsi P menjelaskan secara empiris fenomena asimetri temporal disinformasi, di mana konten menyesatkan memanfaatkan keunggulan kecepatan sirkulasi yang tidak dapat diimbangi oleh mekanisme verifikasi jurnalistik. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya verifikasi. Di tengah arus informasi yang terus meningkat, Cenderawasih Pos menjalankan sistem manajemen verifikasi berbasis dampak, yaitu mendahulukan penanganan konten yang berpotensi merugikan publik paling luas. Redaktur AH menjelaskan logika triage redaksional yang dioperasikan:

“Kami punya standar verifikasi yang tinggi, tapi tim kami terbatas. Tidak semua klaim yang masuk bisa langsung kami kejar. Harus ada prioritas, mana yang dampaknya paling besar, mana yang paling banyak beredar. Yang lain terpaksa menunggu, dan selama menunggu itu, hoaks terus menyebar.” (Informan AH, Redaktur, wawancara September 2025)

Pernyataan AH mencerminkan praktik penetapan prioritas berbasis risiko publik sebagai bentuk profesionalisme dalam mengelola sumber daya terbatas, bukan semata kelemahan institusional.

Tantangan ketiga adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat Papua. AE menjelaskan dimensi ini:

“Kami buat infografik yang sudah sesimpel mungkin, bahasa sudah kami sederhanakan, tapi tetap saja ada audiens yang lebih percaya pesan berantai di WhatsApp dari sumber yang tidak jelas dibanding konten dari media resmi. Ini soal kepercayaan dan kebiasaan, bukan hanya soal pengetahuan.” (Informan AE, Tim Media Sosial, wawancara September 2025)

Observasi AE menunjukkan bahwa resistensi terhadap verifikasi berakar bukan pada ketidaktahuan teknis, melainkan pada jaringan kepercayaan informal yang lebih kuat daripada otoritas media. Tantangan keempat adalah tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu independensi editorial. Redaktur WF menyampaikan pengakuan ini:

“Ada saja tekanan dari luar, kadang dari kepentingan tertentu yang tidak suka kalau kita koreksi informasi yang menguntungkan mereka. Kami harus kuat di sini. Begitu ruang redaksi bisa diintervensi, selesailah peran kami sebagai media yang bisa dipercaya.” (Informan WF, Redaktur, wawancara September 2025)

Pernyataan WF menegaskan bahwa independensi editorial merupakan prasyarat fungsional bagi keberlangsungan peran civic media. Ketika tekanan eksternal berhasil membelokkan keputusan redaksional, Cenderawasih Pos tidak lagi dapat berfungsi sebagai penjaga ruang publik (Habermas, 1989).

Keempat tantangan ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa solusi atas persoalan disinformasi di Papua tidak dapat bertumpu pada perbaikan satu institusi media semata. Cenderawasih Pos hanya dapat menjalankan peran civic media secara optimal apabila didukung oleh empat kondisi eksternal yang saling menopang: masyarakat dengan kemampuan kritis mengevaluasi informasi, sinergi terstruktur antarlembaga pemerintah dan pendidikan, akses terhadap teknologi pengecekan fakta yang memadai, serta jaminan kebebasan redaksi dari tekanan kepentingan di luar jurnalisme.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama yang menjawab rumusan masalah. Pertama, Cenderawasih Pos menjalankan peran civic media dalam menangkal disinformasi di Papua melalui konstruksi redaksional berlapis yang mencakup dimensi niat, kejelasan sumber, dan muatan emosional, sehingga respons editorialnya tidak terbatas pada verifikasi faktual semata. Kedua, peran tersebut berkontribusi pada pembentukan civic literacy masyarakat Papua melalui tiga domain yang saling melengkapi, yaitu civic knowledge tentang hak dan kewajiban konstitusional, civic skills berupa kemampuan verifikasi mandiri, serta civic dispositions yang

membangun kohesi sosial sebagai benteng terhadap disinformasi. Ketiga, apa yang dilakukan Cenderawasih Pos dalam menangkal disinformasi sesungguhnya adalah perwujudan dari mandat yang sudah ada sejak 1999 dalam UU Pers, bahwa pers bukan hanya penyampai berita, melainkan pendidik warga. Mandat itu dijalankan melalui dua jalur, yakni memastikan informasi yang keluar dari redaksi sudah terverifikasi, dan membangun kemampuan pembaca untuk memverifikasi sendiri. Masalahnya, kedua jalur itu beroperasi dalam ekosistem yang tidak selalu mendukung. Hoaks lebih cepat menyebar dari koreksi bisa diterbitkan, tim yang ada tidak pernah sebanding dengan volume yang harus ditangani, sebagian masyarakat sudah terlanjur lebih percaya pesan di grup WhatsApp, dan tekanan dari luar selalu ada.

Menghadapi kenyataan itu, dua hal paling konkret yang bisa dilakukan adalah pertama, Cenderawasih Pos perlu memperkuat sistem verifikasi dengan bantuan teknologi. Bukan untuk menggantikan jurnalis, tetapi agar jurnalis tidak terus-menerus kalah start dari disinformasi. Kedua, Pemerintah Daerah Papua perlu memahami bahwa mendukung media lokal bukan berarti mengendalikannya, justru sebaliknya adalah memberi ruang dan perlindungan bagi media lokal untuk bekerja secara bebas adalah investasi paling nyata dalam stabilitas informasi di Papua. Bagi institusi pendidikan di Papua, baik tingkat menengah maupun tinggi, diperlukan integrasi kurikulum literasi media dan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis kasus-kasus disinformasi kontekstual, serta kerja sama langsung dengan redaksi media lokal melalui program magang, kuliah tamu, dan penelitian kolaboratif. Bagi penelitian lanjutan, diperlukan studi komparatif antarmedia lokal di wilayah rentan konflik di Indonesia, kajian longitudinal atas dampak intervensi literasi digital terhadap perilaku verifikasi masyarakat, serta pengembangan kerangka pengukuran (indicator framework) untuk menilai efektivitas civic media dalam konteks ekosistem informasi demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of qualitative research* (N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, Eds.). SAGE Publications.
- Fatimah Az-zahra, Rouli Br Lumban Batu, Thereza Dwi Ningrum Siburian, & Triya Anggraini. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 327–338. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9706>
- Gordon, E., & Mihailidis, P. (2016). *Civic media: Technology, design, practice* (E. Gordon & P. Mihailidis, Eds.). MIT Press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

- Mawara, R. E. (2025). *Jurnalisme Etik vs Ujaran Kebencian*. Penerbit Widina.
- Mawara, R., & Rusli, T. S. (2025). Peran Aparat, Kebijakan Publik, dan Ketimpangan Sumber Daya: Perspektif Mahasiswa PGSD Tentang Konflik HAM di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 214–224. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9691>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, D. S., Nurmali, Y., Sari, D. P., & Saputri, R. Y. (2025). Instructional Design Pendidikan Pancasila dalam Penguatan Moral Character di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 339–350.
- Schudson, M. (1998). *The good citizen: A history of American civic life*. Free Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumule, A., Yoman, A. G. S., Solaiman, A., Kira, B., Astuti, B. S., Laksmi, B. I., & Rusmanta, Y. B. (2024). *Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua*. Unpar Press.
- Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1), 38–52.
- Sutomo, M., Dohamid, A. G., & Timur, F. G. C. (2022). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pembungkahan Informasi Isu Papua Tahun 2021. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2149–2158.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *INFORMATION DISORDER: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making* *Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*.
- Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D. (2020). Framing of Online Media News about Riots in Papua (Studies on www.detik.com and www.reuters.com in 2019). *Journal Pekommas*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050109>